Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

Aqnaa Saffero Az – 14010116120013
aqnaasaffero@gmail.com
Dosen Pembimbing : **Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A**
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat dengan tingkat heterogenitas tinggi sangatlah kompleks, hal tersebut dapat menjadi kekuatan positif maupun negative tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya. Pemerintah menciptakan suatu inovasi kebijakan yang dapat mencegah terjadinya perpecahan dan konflik komunal yaitu dibentuknya program desa sadar kerukunan. Konstruksi perdamaian yang terbangun di desa sadar kerukunan merupakan bahasan yang menarik bagi peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana civic engagement dapat membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan serta menganalisis integrasi elit dalam implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case-study), melalui pengumpulan data lapangan dari sumber primer yang dilakukan dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dari dokumen maupun data laporan instansi terkait.

Terdapat beberapa temuan dari penelitian ini yaitu jaringan keseharian dan adanya komunitas interkomunal sangat berperan dalam membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan Kelurahan Kranggan. Kemudian Implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan tidak terlepas dari mekanisme integrasi elit yang terbagun dalam dialog sadar kerukunan yang diinisiasi oleh kerjasama antara Kementrian Agama, KANWIL KEMENAG, dan FKUB. Namun pada implementasinya pembinaan dari pusat atas program tersebut tidak berkesinambungan dan terkesan sebagai program insidentil.

Implementasi program desa sadar kerukunan diharapkan bukan hanya sekedar kegiatan seremonial namun benar-benar menunjukan upaya pemerintah dalam menjaga wilayah rawan konflik. Selain itu diharapkan FKUB memiliki mekanisme koordinasi yang baik agar memudahkan pengurus dalam membina hubungan antar komunal di wilayahnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan temuan dalam program tersebut di daerah lain dan mengkaitkannya dengan adanya fenomena politik identitas di daerah tersebut agar menghasilkan temuan dengan pandangan yang berbeda.

Kata Kunci: Keterlibatan Masyarakat, Kerukunan, Integrasi Elit, Program

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas tinggi karena kemajemukan yang ada sangat kompleks dalam berbagai aspek yang meliputi suku, tradisi, agama, kebudayaan, cara hidup, pandangan maupun pilihan politik yang dianut oleh masyarakat. Menurut teori terdapat empat macam indicator kemajemukan yaitu kemajemukan ideologis (perbedaan mengenai kepercayaan), kemajemukan politis, kemajemukan kultural, dan kemajemukan structural. Konsep kemajemukan tersebut tercermin di Kelurahan Kranggan Kabupaten Ambarawa Jawa Tengah, masyarakat Kelurahan ini sangat majemuk karena terdapat lima kelompok umat agama yang berbeda seperti Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Konghucu, berbagai etnis seperti etnis Tionghoa, Jawa, Madura, memiliki latar kebudayaan, pilihan politik dan profesi yang beragam. Atas keragaman tersebut setiap kelompok memiliki kebutuhan untuk mengembangkan solidaritas dalam kelompoknya, namun yang menjadi persoalan bagaimana kelompok tersebut mengekspresikan indentitasnya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak mengganggu kelompok lain dengan adanya keanekaragaman yang ada dibutuhkan adanya sikap saling menghormati dan saling menyesuaikan diri antara unsur-unsur yang berbeda.

Keragaman dapat dipandang sebagai sebuah dinamika kekuatan positif dan konstruktif, jika masyarakat dapat menerjemahkannya bukan sebagai sebuah realitas social empiric tetapi berganti menjadi suatu realitas alamiah. Namun keragaman tersebut dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan yang negatif dan destruktif apabila tidak dikelola dengan baik (Huat, 2014). Salah satu aspek dari sumber ketegangan masyarakat adalah heterogenitas hal tersebut dapat melunturkan ikatan bersama. Masyarakat yang mejemuk berpotensi untuk mengalami konflik karena mereka melakukan identifikasi kultural dan cenderung terbagi kedalam kelompok berdasarkan identitasnya masing-masing, identifikasi tersebut yang menentukan individu termasuk dalam ingroup atau outgroup (Durkheim dalam Soekanto, 1990)

Berdasarkan konsep Coleman dan Rosberg dalam kajiannya mengenai politik heterogenitas di Indonesia mengidentifikasi bahwa pembelahan secara horizontal yang berakar pada perbedaan ras ,suku dan agama lebih menonjol dari pada dimensi vertical yaitu antara elit dan massa (Nazaruddin, 1989). Menurut data yayasan Denny JA dalam gerakan Indonesia tanpa diskriminasi terhitung sejak 14 tahun setelah reformasi terdapat 2.398 kasus diskriminasi serta kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dari keseluruhan jumlah tersebut 65 persen merupakan kekerasan berlatarbelakang agama kemudian 20 persen yang lain merupakan kasus kekerasan etnis disusul 15 persen kekerasan gender dan 5 persen sisanya merupakan kasus kekerasan orientasi seksual. Persebaran konflik komunal berdasarkan pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa dominan terjadi di daerah dengan kategori perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan luas wilayah geografis kecil atau pada skala local. (Januar, 2014)

Timbulnya kasus tersebut akibat heterogenitas yang tinggi di Indonesia sehingga isu agama, perang antar suku hingga isu etnis pribumi non-pribumi (Tionghoa) tidak dapat terelakkan. Konflik tersebut akan semakin kompleks jika timbul adanya perbedaan pemahaman yang dicampuri atau didukung oleh aspek lain yaitu politik dan ekonomi. Ada banyak contoh konflik politik identitas seperti yang baru-baru ini terjadi ketersinggungan terhadap sensitivitas etnis dan agama yang menimbulkan konflik dan ketidak harmonisan antar pemeluk agama, mulai terasa tegang sejak munculnya kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama memancing kemarahan dari sejumlah pihak situasi tersebut menimbulkan perlakuan

diskriminatif terhadap etnis dan keyakinan seorang minoritas. Berkembangnya isu etnis dan agama mulai digunakan kelompok tertentu dalam upaya memenangkan kontestasi politik bahkan di tingkat nasional yang dapat berpotensi memecah belah bangsa dan menimbulkan polarisasi dalam masyarakat.

Untuk itu pemerintah membutuhkan adanya pendekatan perencanaan social (social planning approach) sebuah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk memahami serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang dianut sehingga dapat melahirkan rasa saling menghormati dan mampu hidup secara berdampingan dalam kemajemukan (Mudzar, 2006). Pemerintah harus menyadari bahwa civil society memiliki peran dalam menjaga persatuan bangsa karena bagaimanapun stabilitas negara akan terganggu apabila warga negaranya saling mengedepankan kepentingan atas identitas kelompok, kerukunan dalam masyarakat majemuk merupakan factor yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas demi mendukung jalannya program pembangunan nasional. Kerukunan dalam konteks tersebut bukanlah penyeragaman karena masyarakat masih memiliki latar belakang atau identitas masing-masing namun bentuk kerjasama antar masyarakat dalam mewujudkan keserasian dan keharmonisan dalam suatu system yang menghasilkan kesepakatan nilai yang di junjung tinggi bersama.

Terdapat sebuah pandangan mengenai penanganan konflik komunal yang dapat dicegah dengan menggunakan kerangka kerja demokrasi politik karena melalui hal tersebut perbedaan yang ada dianggap dapat diselesaikan secara damai. Demokrasi memiliki keterkaitan dengan teori civic engagement Varshney yang mengatakan bahwa melalui lingkungan yang demokrastis, masyarakat sipil dapat berkembang dalam hubungan interkomunal. Jika konflik muncul hal tersebut dapat dicegah dengan meregulasikan dan diselesaikannya melalui metode yang menekankan terciptanya perdamaian. Menurut penelitian yang dilakukan Yayasan SETARA Institute pada tahun 2017 meskipun konflik komunal terutama konflik keagamaan masih terjadi hingga saat ini namun frekuensinya menurun. Hal tersebut didasari dengan adanya inisiatif oleh lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah dalam aspek regulasi maupun program guna meningkatnya terciptanya kedamaian atau kerukunan. Sebagai contoh pada tahun 2017 Wahid Foundation yang menginisiasi pembentukan kampung damai pada tiga provinsi di Indonesia, yakni JATIM, JATENG dan JABAR. Program tersebut dibentuk berdasarkan pemahaman bahwa kerukunan dan perdamaian dapat terbentuk jika masyarakat mampu mandiri dan kuat secara ekonomi.

Pemerintah juga menciptakan suatu inovasi kebijakan melalui identifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik komunal yaitu dibentuknya program desa sadar kerukunan yang dimulai pada tahun 2017. Sebanyak 34 desa di Indonesia dimana masing-masing provinsi terdapat 1 desa/kelurahan yang menjadi pilot project program tersebut salah satu diantaranya termasuk di Kelurahan Kranggan yang mewakilkan provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap diberbagai daerah di Indonesia guna mempertahankan zero konflik sekaligus menjadikan desa/kelurahan tersebut sebagai percontohan bagi wilayah disekitarnya. Program desa sadar kerukunan ini merupakan program unggulan Kementrian Agama yang diciptakan dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia mandiri ,berdaulat dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong yang memiliki sasaran program peningkatan kerukunan intra dan antar umat beragama. Berdasarkan tujuan tersebut KEMENAG Provinsi berkoordinasi dengan sector ditingkat kabupaten untuk membangun kawasan sadar kerukunan di tingkat desa/kelurahan. Ruang lingkup dalam

pelaksanaan program tersebut meliputi penetapan lokasi, pembentukan kader kerukunan umat beragama, dan penyebarluasan informasi dalam bentuk kegiatan dialog, seminar, diklat teknis, FGD, workshop, lokakarya maupun sosialisasi. Konstruksi perdamaian yang terbangun di desa sadar kerukunan merupakan bahasan yang menarik dan penting bagi peneliti karena hal tersebut merupakan suatu hal yang actual mengingat berbagai isu permasalahan yang hadir saat ini. Berdasarkan asumsi dan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai bagaimana konstruksi perdamaian dapat terbangun di kelurahan Kranggan.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang lokasi ini dipilih karena dapat menggambarkan miniature kehidupan multicultur di Indonesia dengan tingkat keberagaman masyarakatnya yang tinggi. Peneliti mencoba melihat perbedaan dalam masyarakat Kelurahan Kranggan sebagai sebuah realitas politik yang harus dikelola secara demokratis yaitu mensayaratkan pentingnya hubungan yang setara dan saling memahami. Perbedaan tersebut dikerucutkan dalam tiga aspek yaitu etnis, agama dan pilihan politik yang ada secara lebih mendalam, ketiga hal tersebut dipilih karena peneliti berasumsi bahwa ketiga aspek tersebut merupakan perbedaan yang paling mencolok dan lebih berpotensi menimbulkan konflik dibanding aspek lain selain itu pembatasan aspek dilakukan agar penelitian lebih terstruktur.

Berdasarkan argument tersebut peneliti memandang akan menarik jika melihat bagaimana konstruksi perdamaian dapat terbangun di kelurahan Kranggan melalui prespektif civic engagement menurut Varshney dan integrasi elit menurut Tadjoeddin. Maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah terkait dengan keterlibatan warganegara dalam membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan Kelurahan Kranggan, serta bagaimana integrasi elit dalam implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan. Sebagai sebuah kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Menganalisis keterlibatan warganegara dalam membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan Kelurahan Kranggan
2. Mendeskripsikan integrasi elit dalam implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan

Civic Engagement

Ashutosh Varshney mengembangkan konsep *civic engagement* dalam bukunya yang berjudul Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India (2002). *Civic engagement* dipahami sebagai partisipasi publik yakni terbentuknya jaringan antar masyarakat. Teori *civic engagement* ini dikembangkan berdasarkan pengamatan empiris di India mengingat tingginya kekerasan komunal disana yang masih berlangsung hingga saat ini namun kekerasan tersebut tidak terlokalisasi dalam artian tidak merata di seluruh negeri. Hal tersebut diamati selama tujuh tahun studi mendalam dimana secara sistematis Varshney membandingkan tiga kota dengan intensitas kerusuhan yang tinggi antara Hindu-Muslim dan tiga kota lainnya yang terhindar dari kerusuhan agar mendapatkan formula yang tepat. Berdasarkan penelitiannya di kota yang tergolong damai, beberapa konflik kecil memang terjadi namun frekuensi dan penyebarannya berhasil dibatasi sehingga kedamaian komunal dapat bertahan dengan adanya jaringan *inter-communal* disana.

Istilah komunal dipergunakan dalam ranah politik dan konflik yang didasarkan atas pengelompokan identitas keagamaan, kesukuan, sectarian, kelas sosial, afiliasi politik, maupun hanya perbedaan kampung. Secara teori terdapat dua ranah civic engagement yaitu inter-communal dan intra-communal hal tersebut memiliki fungsi dan penanganan yang berbeda sesuai dengan ranah konfliknya. Fokus dari penelitian Varshney yaitu pada asosiasi yang bersifat inter-communal dan didapati bahwa hubungan yang kuat antar struktur komunitas plural dalam konteks Hindu-Muslim berpengaruh terhadap terciptanya perdamaian komunal. Sementara dalam pola ikatan intra-communal jaringan yang terbentuk hanya berdasarkan kesamaan tertentu, mereka menjalani komunikasi secara intensif berdasarkan komunal sehingga terbentuk jaringan eksklusif yang memungkinkan mereka menutup diri atas kelompok komunal lain justru semakin mempertegas sekat antar komunitas. Karena tidak adanya interaksi maupun komunikasi interkomunal yang baik, ikatan ini cenderung berpotensi menimbulkan konflik ketika terjadi provokasi atau rumor antar komunitas.

Selain pembagian interkomunal dan intrakomunal, Varshney membagi lagi civic engagement menjadi dua sifat yaitu pertama ikatan keseharian (quotidian) melalui aktivitas rutin seperti : kerja bakti, kegiatan PKK maupun dawis, saling kunjung antar individu yang berbeda unsur, mengadakan suatu kegiatan bersama, dsb. Sedangkan yang kedua dalam bentuk formal / structural (asosiasional) yaitu berupa aktifitas masyarakat yang terorganisir seperti organisasi bisnis, komunitas budaya, paguyuban profesi, serikat buruh, dan partai politik. Varshney mengatakan bahwa ikatan quotidian mampu membawa kerukunan di pedesaan india karena tingginya intensitas interaksi antar masyarakat namun hal tersebut sulit terjadi pada masyarakat perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Atas dasar itulah ikatan asosiasional dirasa mampu mengakomodir kepentingan yang tidak terpenuhi dalam interaksi keseharian dan dirasa lebih kuat terutama ketika ada aktor-aktor tertentu yang berupaya mempolarisasi dan memprovokasi komunitas untuk kepentingan politis melalui berbagai isu seperti agama maupun ras dapat terbendung oleh kepentingan yang mengikat.

Integrasi Elit

Teori ini merupakan pendapat kritis Tadjoeddin terhadap teori Varshney yang menonjolkankan peran masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Menurut pengamatan Tadjoeddin dalam konteks sosial politik di Indonesia jika civic engagement belum efektif dalam meredam konflik integrasi elit memiliki potensi yang lebih besar karena Indonesia memiliki budaya patron-client yang kuat di mana jika fragmentasi di kalangan elite terjadi maka akan berimbas dan dirasakan oleh pengikut mereka, hal tersebut dapat dikonversi menjadi kekerasan di antara anggota komunitas yang berbeda. Konflik atau gesekan di tingkat elit seharusnya dapat diselesaikan dengan baik di antara para elit itu sendiri namun ada beberapa oknum elit yang justru memainkan peran dalam memprovokasi pengikutnya.

Elite dalam teori ini merupakan elit non politik yaitu seseorang yang menduduki jabatan strategis yang memiliki pengaruh dalam lingkup masyarakat contohnya seperti elite keagamaan, kepemudaan ,elit organisasi kemasyarakatan, profesi dan sebagainya. Tadjoeddin mendefinisikan elit menjadi dua yaitu elit terintegrasi dan elit terfragmentasi. Elit terintegrasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat suatu nilai consensus ada diantara para elit yang didukung oleh kerja sama dan rasa saling percaya antara kelompok yang berbeda dan ada jaringan inklusif dan interaksi pribadi yang luas di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Jika kedua syarat tersebut tidak dapat ditemukan maka dapat dikatakan bahwa elit terfragmentasi.

Berdasarkan pengamatan reflektif yang dilakukan Tadjoeddin mengenai bagaimana mekanisme integrasi elit bekerja di Indonesia data menunjukan terdapat dominasi dua tren integrasi elit yang ada di Indonesia yaitu tingginya segregasi komunitas di Indonesia, dan dominasi budaya paternalistik dalam masyarakat. Jika elit terintegrasi maka terbangun jaringan horisontal di antara elit yang berbeda komunitas dan pada saat yang sama dapat mempermudah arus informasi dan proses komunikasi yang dikembangkan secara vertical antara elit dan pengikut atau massa mereka. Mekanisme tersebut berkontribusi besar terhadap pencegahan kekerasan antar-komunal. Sikap saling percaya dan menghargai konsensus terbentuk di antara para elit dari berbagai tingkatan dan kepentingan yang berbeda. Integrasi elit dapat dipahami melalui dua prespektif yaitu koordinasi elit (elite coordination) dan pembagian kekuasaan (consociational). Koordinasi elit ditafsirkan sebagai komponen penting dari mekanisme kebijakan diri antar elit sedangkan pembagian kekuasaan merupakan kompromi di antara elit dari kelompok komunal yang bersaing (Tadjoeddin, 2004).

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

1. Civic Engagement

1.1 Resistensi Jaringan Keseharian

Jaringan kewarganegaraan dalam keseharian masyarakat menunjukkan aktivitas yang relative berbeda tergantung pada lokasi dan kebiasaan setiap daerah. Di Kelurahan Kranggan yang notabene merupakan wilayah urban perkotaan memiliki ke khasannya sendiri yaitu masih ditemukan interaksi hubungan antar tetangga yang intim seperti dipedesaan, nilai-nilai gotongroyong dan guyup rukun terjaga hingga saat ini. Menurut penulis pola pemukiman mempengaruhi jaringan yang terbentuk di Kranggan pola pemukiman yang ada tidak membentuk kantong-kantong komunitas tertentu yang berpusat di lokasi yang sama dapat dikatakan bahwa keberadaan etnis Tionghoa maupun etnis lain tersebar di berbagai wilayah perkampungan sehingga tidak tercipta eksklusifitas. Interaksi keseharian ini bersifat spontan berdasarkan inisiatif masyarakat karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kondisi ini membuat dialog antar masyarakat menjadi sesuatu kegiatan keseharian, dari dialog tersebut usaha pemahaman mengenai perbedaan yang ada memasuki tahapan baru. Bermula dengan rasa ingin tahu, ketidakpahaman atau rasa kagum, mereka saling bertanya, berusaha saling memahami. Hal yang mendasari terjadinya interaksi keseharian yang baik merupakan kunci terciptanya kerharmonisan masyarakat berawal dari pemahaman dan kesadaran individu dalam mengartikulasikan perbedaan.

Peneliti mencari informasi mengenai pendapat masyarakat Kelurahan Kranggan dalam memandang arti perbedaan melalui sumber yang kredibel dan didapatkan data yang menunjukan bahwa mereka tergolong masyarakat inklusif (terbuka) terbuka untuk siapa pun dapat bergaul secara lintas budaya dan agama, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada dan menganggap bahwa perbedaan tersebut ada agar masyarakat saling mengisi satu sama lain

dan merupakan bagian dari komposisi sosial masyarakat yang heterogen realitas inilah yang berkontribusi terhadap perdamaian yang ada di kelurahan Kranggan. Sikap tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Kranggan dapat hidup bersama tanpa ada konflik yang berarti. Sikap masyarakat Kelurahan Kranggan tersebut muncul karena heterogenitas yang ada telah berlangsung cukup lama dan dapat dikatakan melalui sejarah yang panjang. Berkembangnya agama dan etnis banyak dipengaruhi oleh kedatangan colonial Belanda yang menjadikan kota Ambarawa sebagai kota militer secara tidak langung banyak orang asing maupun local yang masuk ke daerah tersebut dengan berbagai macam tujuan seperti berdagang maupun menyebarkan agama. Selama bertahun-tahun mereka hidup bersama terjalin interaksi yang menyebabkan terbangunnya kedekatan dan kerukunan diantara mereka.

Penerimaan adanya orang lain yang memiliki latar belakang agama, suku bangsa, ras yang berbeda menyebabkan masyarakat tidak bertindak diskriminatif. Dalam konteks kepemimpinan di Kelurahan Kranggan terdapat anggota DPRD Kab. Semarang bernama The Hok Hiong, merupakan seorang petahana yang terpilih selama 6x masa jabatan beliau berasal dari kalangan minoritas beragama katolik dan berdarah Tionghoa. Pada pemilu legislative tahun 2019 beliau sebagai peraih suara terbanyak di kabupaten Semarang, dapat diartikan bahwa ia mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kranggan yang memilih tanpa memandang latar belakang namun kemampuan beliau dalam memimpin. Mengenai perbedaan pilihan politik masyarakat Kelurahan Kranggan menganggap hal tersebut sebagai ranah pribadi yang tidak perlu diperdebatkan walaupun hal-hal yang berbau politik sering diperbincangkan namun hal itu tidak berpengaruh terhadap hubungan antar masyarakat. Pada pemilu 2019 panitia pemungutan suara mengkampanyekan selogan “Bedo Ora Opo” untuk menghindari adanya polarisasi politik. Mereka bahkan mempersiapkan berbagai jenis makanan dan minuman gratis bagi semua pemilih hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif warga bukan merupakan bantuan dari caleg maupun partai tertentu.

Masyarakat Kranggan yang tidak mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut disebabkan masyarakat telah mengalami amalgamasi atau perkawinan campuran yang terjadi secara alamiah. Mereka para pendatang yang merantau kesuatu daerah memiliki ketertarikan dan menikah dengan penduduk local ada juga yang berbeda keyakinan namun hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi mereka. Seiring berjalannya waktu, ikatan darah tersebut yang semakin menipiskan sekat-sekat antar etnis maupun keyakinan yang ada. Kelurahan ini jarang terjadi konflik besar namun bukan berarti sama sekali tidak pernah mengalaminya menurut penuturan Lurah Kranggan penyelesaian konflik dapat diatasi secara kekeluargaan melalui forum kerukunan umat beragama itu dan juga meminta tolong ke kelurahan. Untuk itu kelurahan Kranggan dijadikan daerah percontohan sebagai desa sadar kerukunan dan merupakan pilot project Jawa Tengah. Masyarakat Kranggan memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola heterogenitas yang ada inilah yang menjadikan daerah tersebut memiliki keunikan. Untuk menghindari adanya konflik dan kesalahpahaman masyarakat intercommunal, interaksi aktivitas keseharian yang baik di diciptakan melalui sejumlah kegiatan atau dengan menyediakan fasilitas ruang publik terbuka sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat intercommunal untuk bertemu. Di kelurahan Kranggan interaksi intercommunal termanifestasi dalam berbagai bentuk kegiatan seperti sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosial

Misi kemanusiaan merupakan salah satu media penghubung antar masyarakat interkomunal, terdapat berbagai bentuk kegiatan seperti tradisi mengunjungi warga yang mengalami musibah seperti meninggal dunia atau sakit masih sangat kuat di Kelurahan Kranggan. Kegiatan ini dilakukan tanpa memandang latar belakang keyakinan, etnis maupun pilihan politik bahkan terdapat paguyuban rukun kematian. Paguyuban tersebut terbagi menjadi 2 berdasarkan cakupan wilayah yang pertama bernama Pangkur Wiloyo yang melingkupi RW 1- RW 5 meliputi 4 perkampungan diketuai oleh bapak Bambang Prakoso dan Widyoloyo yang melingkupi RW 6 – 8 meliputi 3 perkampungan diketuai bapak Sunar yang beragama katolik. Selain itu masyarakat Kelurahan Kranggan memiliki jiwa sosial yang ditinggi tidak hanya sebatas dengan sesama wilayah saja hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat Kranggan dalam kegiatan penggalangan dana yang digunakan untuk donasi bencana gempa Lombok Utara pada tahun 2018. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 10.215.00 yang diserahkan kepada wakil bupati dan badan anggaran DPRD Kab. Semarang. Kegiatan kerjabakti membersihkan lingkungan juga masih dilakukan masyarakat Kelurahan Kranggan hal ini dilakukan secara sukarela bahkan pernah diadakan kerja bakti membersihkan rumah ibadah yang ada seperti masjid, gereja, pura, maupun klenteng secara bergantian pada event tertentu, biasanya kegiatan tersebut juga diinisiasi oleh aparat TNI maupun masing-masing pemuka agama. Hal tersebut dilakukan untuk memupuk rasa persaudaraan dan toleransi diantara mereka bahwa perbedaan yang ada tidak mempengaruhi hubungan sosial yang sudah terjalin diantara mereka.

2. Kegiatan Ekonomi

Mayoritas masyarakat Kelurahan Kranggan merupakan wirausaha yang mengembangkan bisnisnya dengan membuka toko, disepanjang jalan utama kelurahan ini di dominasi oleh kompleks pertokoan. Bisnis yang digeluti bervariasi seperti jasa perbengkelan, toko elektronik, rumah makan, toko pakaian, jasa pengobatan alternative, jasa percetakan, toko oleh-oleh maupun kerajinan. Perekonomian di Kelurahan Kranggan secara general dijalani oleh beragam etnis maupun agama namun pertokoan disepanjang jalan besar didominasi oleh etnis Tionghoa. Interaksi interkomunal terjadi ketika kepentingan ekonomi saling bertemu dan membutuhkan satu sama lain yaitu ketika masyarakat bertransaksi. Penulis melakukan observasi bahwa meskipun pemilik toko merupakan etnis Tionghoa namun mereka memperkerjakan orang dari etnis jawa, seringkali toko-toko tersebut digunakan untuk bercengkraman antar sesama warga. Walaupun mayoritas pegusaha berasal dari etnis Tionghoa namun tidak terjadi kesenjangan status sosial bahkan kebanyakan dari mereka memiliki jiwa sosial tinggi dan sering menjadi donatur acara besar disana.

3. Kegiatan Tradisi dan Festival

Festival merupakan ajang yang dapat membangkitkan antusias setiap masyarakat dan merupakan alternative kegiatan yang dapat mempersatukan masyarakat heterogen di suatu wilayah. Terdapat berbagai perayaan yang dirayakan masyarakat Kelurahan Kranggan yang pertama yaitu Karnaval Pawai 17 Agustus se-Ambarawa yang berisi kegiatan pawai arak-arakan kostum, pembuatan miniature, pagelaran seni, berbagai lomba, dsb. Perayaan peringatan hari kemerdekaan tersebut mencerminkan persatuan bahwa walaupun terdapat berbagai macam perbedaan masyarakat memiliki identitas yang sama yaitu bangsa Indonesia. Dalam kegiatan pawai tersebut Kelurahan Kranggan selalu mendapatkan juara sebagai kelurahan terbaik se-

Ambarawa atas kekompakannya karena merupakan wilayah yang terkecil sehingga mempermudah koordinasi antar perkampungan maupun RW. Kedua adanya festival kuliner pasar Krempyeng yang diadakan satu tahun sekali dimana masyarakat saling menunjukan kemampuannya dalam menciptakan produk makanan untuk dijual dan dipamerkan dalam festival tersebut. Selain sebagai salah satu media interaksi interkomunal hal ini juga dapat mendorong dan mengakomodasi masyarakat dalam memajukan ekonomi kreatif meningkatkan perekonomian keluarga serta memunculkan potensi produk yang kembangkan menjadi usaha bersama. Ketiga merupakan acara Haul Kyai Lembah beliau penyebar agama Islam yang hidup sebelum Kerajaan Demak dan percaya merupakan cikal bakal penamaan Ambarawa. Lokasi makam Kyai Lembah berada di kampung Kepatihan Kelurahan Kranggan namun kurang dikelola dengan baik akses jalannya sangat sempit sehingga tidak terekspos. Biasanya acara haul tersebut dirayakan dengan mengundang tokoh penting se-Ambarawa Kyai setempat akan menyampaikan kotbah dan memimpin doa, pembacaan ayat suci Al Qur'an, hiburan dsb. Acara ini lekat akan kegiatan umat muslim namun diketahui bahwa masyarakat non muslim ikut andil dalam mendukung acara tersebut karena kejadian tersebut merupakan cikal-bakal sejarah kota mereka. Keempat mayoritas masyarakat Kelurahan Kranggan merupakan suku Jawa yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi contohnya dengan masih dilaksanakannya tradisi nyadran. Rangkaian acara ini meliputi kegiatan pembersihan makam leluhur, acara doa bersama dan puncaknya masyarakat menggelar kenduri atau makan bersama dengan alas daun pisang di sepanjang areal makam. Acara ini diikuti oleh segala kalangan tidak terkecuali bapak The Hok Hiong yang merupakan anggota DPRD Kab. Semarang.

4. Kegiatan Keagamaan

Keyakinan merupakan hal yang sensitive bagi sebagian orang karena menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip begitu pula yang terjadi di Kelurahan Kranggan masing-masing individu memiliki keyakinan atas setiap ajarannya. Masyarakat kelurahan Kranggan memiliki prinsip yang berbeda dalam memberikan ucapan namun saling mengucapkan selamat pada hari besar keagamaan sangat lumrah. Selepas Idul Fitri di tingkat RT maupun RW mengadakan halal bi halal yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai media untuk saling memaafkan. Pada saat Idul Adha seluruh warga bergotongroyong dalam mempersiapkan daging yang akan dibagikan biasanya laki-laki bertugas memotong hewan kurban sedangkan para perempuan mempersiapkan menu makan siang untuk di nikmati bersama. Bahkan ada masyarakat non muslim yang menyumbang hewan kurban atas dasar rasa ingin berbagi. Sedangkan saat perayaan Imlek dilakukan secara terbuka untuk umum masyarakat berbondong-bondong hadir meski bukan dengan niat beribadah namun menonton pertunjukan dan pembagian angpau oleh pihak Klenteng. Tokoh lintas agama turut diundang dalam acara tersebut dalam perayaan tersebut banyak etnis Tionghoa yang membagikan kue keranjang kepada tetangga mereka untuk berbagi kebahagiaan.

5. Kegiatan Rutin RT

Negara turun andil dalam memperkuat adanya komunitas kewarganegaraan dengan adanya rukun tetangga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dan berjalannya keberlangsungan demokrasi yang akan menjadikan negara lebih responsif dan efektif. Keberadaannya menjadi sangat penting di wilayah urban karena hampir keseluruhan dari warga mereka berasal dari berbagai asal daerah berbeda yang menyebabkan terkikisnya solidaritas tradisional. Kegiatan rutin RT yang diadakan setiap bulan ini berlaku sebagai mediator yang

mempertemukan masyarakat heterogen untuk membangun komunikasi yang baik antar masyarakat agar tidak hanya mengenal secara pribadi namun juga terhadap kepercayaan ,budaya, serta hal lain yang berbeda dari yang dimilikinya sekaligus sebagai bentuk preventif dalam menangani permasalahan dan berbagai isu-isu sosial. Komunikasi rutin pada masyarakat interkomunal diperlukan untuk memelihara kedamaian agar rasa aman saling menjaga satu sama lain tumbuh serta menciptakan suatu ikatan emosional yang kuat antar masyarakat.

1.2 Komunitas Sebagai Unsur Perekat

Intensitas interaksi keseharian masyarakat heterogen bukanlah variable independent karena tidak cukup mencegah munculnya potensi provokasi maupun ancaman terutama di wilayah perkotaan yang notabene sibuk dengan kepentingan masing-masing sehingga intensitas interaksi kesehariannya rendah. Masih ada beberapa variable lain yaitu interaksi melalui asosiasi atau sebuah organisasi namun hal itu sulit ditemukan karena lokasinya yang kecil mayoritas asosiasi yang ada yaitu ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Asosiasi atau organisasi hanya terbatas pada bidang ekonomi, keolahragaan dan kebudayaan. Indikator yang digunakan untuk melihat adanya interaksi interkomunal dalam suatu asosiasi atau organisasi yaitu dengan memastikan keanggotaannya memiliki latar belakang beragam. Pada bidang ekonomi di kelurahan Kranggan terdapat lembaga keuangan mikro (lembaga keuangan kelurahan) yang berfungsi menyediakan layanan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam bisnis sekala mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat mayoritas masyarakat Kranggan merupakan wirausaha tentu aja lembaga keuangan ini berperan penting terhadap berjalannya perekonomian disana. Para pengelola dan nasabah lembaga tersebut memiliki latarbelakang yang berbeda karena tidak di khususkan untuk etnis maupun keyakinan tertentu saja namun untuk seluruh masyarakat Kranggan. Lembaga ini menjadi media pertemuan antar masyarakat interkomunal walaupun tidak ada asosiasi bisnis disana melalui upaya pemberian bantuan ini memberikan kesempatan terhadap usaha mikro masyarakat menengah kebawah dan mengurangi gap ekonomi dengan pengusaha besar yang mayoritas etnis Tionghoa sehingga dapat menghindari terciptanya kecemburuan sosial.

Sementara itu pada bidang keolahragaan terdapat asosiasi Wushu Genta Suci yang kantor sekertariat dan pusat pelatihannya berada di jalan Kepatihan tepatnya dibawah Klenteng Hok Tik Bio. Wushu dikenal sebagai kungfu atau seni bertempur/bela diri yang berasal dari Tiongkok, olahraga ini telah berlangsung di Kelurahan Kranggan sejak 100 tahun yang lalu sejak klenteng Hok Tik Bio berdiri. Namun karena adanya instruksi presiden No. 14 tahun 1967 saat itu kegiatan tersebut hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja namun semenjak era persiden Abdurrahman Wahid peraturan tersebut dihapuskan dengan ditetapkannya keputusan presiden No. 6 Tahun 2000, sejak saat itu kegiatan Wushu dibuka untuk masyarakat umum. Masyarakat Kelurahan Kranggan bersikap terbuka dan menerima dengan baik kebudayaan lain bahkan memiliki ketertarikan satu sama lain dengan ikut mempelajarinya. Sejak kegiatan tersebut terbuka untuk umum banyak masyarakat dari beragam etnis maupun keyakinan mengikuti kegiatan tersebut. Dalam komunitas ini masing-masing anggota saling berinteraksi, hal itu merupakan proses saling tukar menukar nilai, adat istiadat dan pandangan hidup yang tak terelakkan. Sekat-sekat yang ada memudar seiring berjalannya waktu bahkan pelatih Wushu Genta Suci merupakan seorang muslim. Bisa dikatakan 90% orang pribumi yang terdiri dari berbagai agama bahkan ada yang memakai hijab tidak menjadi masalah mereka focus pada 1 yaitu prestasi maka mereka tidak canggung untuk mendukung kawannya, olahraga

mengajarkan sportifitas jadi sekat-sekat keagaman tersebut hilang. Dalam asosiasi ini terjadi toleransi yang baik antar anggotanya hal ini juga di cerminkan pada aktivitas keseharian diluar kegiatan perguruan Wushu Genta Suci mereka sangat menjaga hubungan baik antar para pemain ataupun anggota dengan ikut merayakan peribadatan satu sama lain sebagai bentuk toleransi. Pada saat Ramadhan asosiasi imi mengadakan buka bersama dan halal bihalal dengan para atlet, begitu juga pada saat imlek panitia yang mempersiapkan acara berasal dari berbagai agama waktu perayaan kita undang semua tokoh agama untuk bersama-sama merayakan

Pada bidang kesenian terdapat paguyuban Reog Sedyo Rukun Kali Gathak Jagalan tarian ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur namun sudah banyak dikembangkan diluar daerah termasuk di wilayah Kabupaten Semarang yang hampir disetiap kelurahannya memiliki paguyuban ini. Tari Reog erat kaitannya dengan icon-icon seperti warok, barongan, jathilan, dan bujang ganong (Ganongan) disetiap pertunjukannya. Paguyuban ini menjadi wadah interaksi interkomunal karena memiliki pemain dengan latar belakang keyakinan berbeda bahkan menurut Lurah Kranggan Bapak Subhan anak-anak keturunan etnis Tionghoa ikut andil dalam melestarikan kebudayaan ini. Asosiasi kesenian menjadi hiburan namun di sisi lain berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat

2. Stagnansi Program

Situasi harmonis dalam masyarakat Kelurahan Kranggan merupakan konstruksi perdamaian yang muncul karena di bangun secara kultural atas kesadaran dan inisiatif local yang dibangun di atas norma, nilai, dan moralitas budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sehingga masyarakatnya sangat memahami makna dan kekuatan dari dalam untuk merawat keragaman keyakinan, etnis, budaya, maupun perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Kerukunan yang ada di Kelurahan Kranggan bukanlah efek dari program Desa Sadar Kerukunan namun murni merupakan ketahanan yang dimiliki masyarakat. Dari penjabaran sub bab sebelumnya diketahui fakta bahwa terbentuknya kerukunan masyarakat yaitu melalui jaringan keseharian maupun komunitas yang ada.

Mayoritas program pemerintah semacam ini bersifat top down yang hanya berorientasi pada branding terlaksananya program yang diakui oleh public. Seperti dalam kasus program desa sadar kerukunan yang dilakukan secara insidental dilebih dari 34 lokasi di Indonesia. Seharusnya pemerintah bisa belajar dari program-program yang diciptakan oleh NGO, contohnya program kampung damai yang dilakukan oleh lembaga Wachid Foundation yang bekerjasama dengan UN (United Nations) Women yang memiliki tujuan serupa dengan program desa sadar kerukunan. Awal terbentuknya program ini muncul dari ide yang dilakukan pada sesi FGD, program kampung damai menitik beratkan program pada peningkatan ekonomi keluarga, penguatan komunitas dan pendampingan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan survey yang dilakukan Wachid Foundation terjadi kolerasi antara kemiskinan dan ketegangan di masyarakat, sehingga atas kegiatan yang diadakan tersebut program berjalan secara keberlanjutan karena menghasilkan suatu hal yang memiliki nilai manfaat secara nyata.

Berbeda halnya dengan program desa sadar kerukunan yang dirancang sebagai kawasan percontohan bagi daerah lain nampaknya hal ini tidak efektif karena program tersebut tidak berkelanjutan sehingga tidak ada kegiatan yang berhasil menarik perhatian masyarakat dari wilayah lain untuk melakukan hal serupa. Aparat pemerintah setempat tidak memiliki

kemampuan pendanaan untuk meneruskan program tersebut. Seharusnya sebagai pilot project kawasan sadar kerukunan hal ini menjadi perhatian lebih karena digunakan sebagai model percontohan untuk daerah lain. Terlebih pembentukan kawasan ini merupakan program unggulan Kementrian Agama yang gencar dilakukan diberbagai daerah saat ini seharusnya didesain secara terstruktur, dimana pelaksanaannya harus menghasilkan tujuan dan output yang jelas.

Satu-satunya hal yang diupayakan dan masih berjalan hingga saat ini yaitu adanya pembinaan kerukunan umat beragama dari FKUB yang diadakan 1 tahun sekali. Hal tersebut didasarkan pada peraturan bersama antara mentri agama dan mentri dalam negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2016 yang menjelaskan mengenai kewajiban kepala daerah dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama untuk itu pemerintah daerah bekerja sama dengan forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang mengemban beberapa fungsi yaitu :

1. Mendeteksi potensi gangguan konflik sejak dini melalui identifikasi factor non-keagamaan yang memicu konflik seperti factor politik, kesukuan, ekonomi.
2. Sebagai mediator antar kelompok yang berkonflik hal tersebut dilakukan agar konflik yang terjadi tidak meluas.
3. Mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan local yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama.

Tidak dipungkiri salah satu penyebab harmoni dan konflik ditentukan oleh posisi dan peran elite tertentu dalam struktur sosial masyarakat keberadaan mereka dibutuhkan sebagai perekat sosial sekaligus pihak yang dianggap memiliki kemampuan maupun kekuatan untuk mampu mempengaruhi dan membantu penyelesaian seandainya timbul konflik antar masyarakat. Contohnya elit keagamaan yang mulanya hanya memiliki peran di bidang transmisi ilmu keagamaan berkembang dan berpengaruh terhadap bidang sosial dan politik, bahkan di Indonesia pandangan kyai menjadi acuan umat dalam kontestasi politik dari tingkat pusat hingga desa. Tokoh elit keagamaan digunakan sebagai agent of change atau informal leader yang dapat dipercaya sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagai pembawa pesan untuk masyarakat termasuk dalam konteks perdamaian.

Integrasi elit diperlukan guna mempermudah arus informasi untuk menyamakan persepsi antar elit agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menyebabkan konflik. Ketika elit antar komunal terintegrasi maka akan terbangun jaringan vertical antara elit dan pengikut yang notabene bersifat paternalistik sehingga mempermudah pemerintah dalam menciptakan keteraturan. Salah satu caranya melalui kegiatan FKUB Kabupaten yaitu diadakan dialog antar umat beragama yang terlaksana setiap tahunnya dengan melibatkan berbagai tokoh agama dan perwakilan unsur masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dari seluruh daerah diharapkan dapat membawa pesan perdamaian di setiap wilayah dan komunitas komunal mereka.

FKUB kabupaten juga bertindak menjalankan program terstruktur yang diamanatkan pemerintah termasuk pada pembinaan kawasan sadar kerukunan. Untuk memudahkan kinerja FKUB juga dibentuk di level kecamatan dan kelurahan hal tersebut sebagai upaya antisipasi sejak dini jika terjadi konflik di wilayah tersebut. Namun berbeda halnya dengan FKUB kabupaten yang fungsinya diatur dalam PBM, di tingkat kecamatan dan kelurahan organisasi kemasyarakatan ini tidak memiliki payung hukum dan juga tidak mendapatkan dana operasional dari pemerintah. Secara operasional kegiatan FKUB Kabupaten mendapat dana dari 2 pihak yaitu Kementrian Agama dalam jumlah yang sama yaitu sebesar 50 juta ditingkat kabupaten dan dari pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah tersebut. Sedangkan FKUB Kelurahan Kranggan yang diketuai oleh bapak Jurianto pada tahun 2017 tidak mendapatkan dana operasional. Sayangnya forum tersebut juga telah fakum semenjak wafatnya bapak Jurianto selaku ketua sampai saat ini belum dilakukan reorganisasi.

Berdasarkan Keputusan Sekertaris Jendral Kementrian Agama No. 22 Tahun 2012 mengenai alokasi dana pembinaan Desa Sadar Kerukunan pada implementasinya hanya diberikan 1x untuk mengadakan kegiatan peresmian kawasan tersebut selebihnya tidak ada monitoring khusus maupun kegiatan yang berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa integrasi elit di Kelurahan Kranggan hanya terbangun melalui keikutsertaan elit keagamaan dalam dialog antar umat beragama yang diadakan FKUB Kabupaten. Namun FKUB Kelurahan Kranggan sendiri belum terbangun dengan baik karena tidak berjalan dengan semestinya, wadah interaksi interkomunal elit yang sudah terbentuk seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang yaitu untuk menjembatani komunikasi antar komunal jika sewaktu-waktu terjadi konflik maupun ancaman dari luar. Walau begitu elit di kelurahan Kranggan tidak terfragmentasi kerena memenuhi dua aspek integrasi elit yaitu :

1. Terdapat suatu nilai consensus ada diantara para elit yang didukung oleh kerja sama dan rasa saling percaya antara kelompok yang berbeda.
2. Ada jaringan inklusif dan interaksi pribadi yang luas di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Antar elit keagamaan di kelurahan Kranggan memiliki hubungan baik secara personal dan memiliki pandangan yang sama dalam memperjuangkan kerukunan. Kerjasama juga pernah dilakukan diawal pembentukan desa sadar kerukunan dengan mengadakan event bersama. Beberapa elit keagamaan yang menjadi narasumber peneliti tergabung dalam FKUB di tingkat yang lebih tinggi seperti halnya bapak WS Liem Ping An selaku pengurus FKUB Jawa Tengah yang menginisiasi terciptanya kerukunan di lingkungannya dengan turut mengundang seluruh tokoh pemuka agama dalam kegiatan yang ia selenggarakannya. Interaksi antar elit terjadi secara perseorangan melalui aktivitas keseharian masyarakat namun tetap saja tidak menutup kemungkinan lemahnya forum komunikasi antar elit di kelurahan Kranggan berresiko jika terdapat ancaman dari luar daerah.

Program desa sadar kerukunan ini dapat dikatakan gagal karena kegiatannya tidak berdampak bagi masyarakat secara berkelanjutan. Seolah program tersebut hanya ditumpangi embel-embel program pemerintah yang sebenarnya jaringan kerukunan tersebut telah

terbentuk secara alami dari generasi ke generasi. Program tersebut juga tidak dibranding dengan baik sehingga dapat menebarkan semangat kerukunan di wilayah lain. Program desa sadar kerukunan ini terus berjalan diberbagai daerah tanpa berkaca pada stagnansi dari lokasi pilot project program tersebut.

PENUTUP

Situasi harmoni masyarakat Kelurahan Kranggan merupakan konstruksi perdamaian yang terbentuk secara kultural atas kesadaran dan inisiatif local yang dibangun di atas norma, nilai, dan moralitas budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sehingga memunculkan resistensi kerukunan dalam jaringan keseharian yang terbentuk atas berbagai aktivitas interkomunal seperti kegiatan kegiatan sosial, ekonomi, tradisi & festival, keagamaan dan kegiatan rutin. Selain itu adanya asosiasi / komunitas interkomunal juga menjadi unsur perekat diantara mereka. Terdapat 3 komunitas yang ada yaitu pada bidang ekonomi dengan adanya lembaga keuangan kelurahan, bidang keolahragaan dengan adanya asosiasi Wushu Genta Suci dan barongsai liong, kemudian di bidang kebudayaan yaitu dengan adanya paguyuban Tari Reog Sedyo Rukun Kali Gathak Jagalan.

Walaupun elit kelurahan Kranggan tidak terfragmentasi karena satu sama lain memiliki hubungan baik secara personal, memiliki pandangan yang sama dalam memperjuangkan kerukunan dan kerjasama pernah dilakukan diawal pembentukan desa sadar kerukunan dengan mengadakan event bersama. Namun tidak adanya reorganisasi FKUB kelurahan Kranggan yang sampai saat ini mengalami kevakuman merupakan bukti bahwa pada implementasi pembinaan program tersebut tidak berkesinambungan. Tidak ada monitoring khusus maupun kegiatan berkelanjutan sehingga program tersebut stagnan atau dapat dikatakan mengalami kegagalan sementara itu program desa sadar kerukunan terus berjalan diberbagai daerah tanpa berkaca pada pilot project program ini sehingga terkesan tidak memperdulikan output yang diperoleh dan hanya mementingkan terselenggaranya suatu program.Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan sebagai berikut :

1. Implementasi program desa sadar kerukunan diharapkan bukan hanya sekedar kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran negara namun benar-benar menunjukan upaya pemerintah dalam menjaga wilayah rawan konflik dan memanfaatkannya untuk mengkampanyekan toleransi dan kerukunan di wilayah sekitarnya.
2. Diharapkan forum kerukunan umat beragama memiliki mekanisme pembentukan, koordinasi maupun payung hukum yang jelas agar memudahkan pengurus membina dan mengembangkan hubungan antar komunal yayng baik di wilayahnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan temuan dalam program tersebut di daerah lain dan mengkaitkannya dengan adanya fenomena politik identitas di daerah tersebut agar menghasilkan temuan dengan pandangan yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak – pihak yang telah menjadi narasumber dan responden didalam penelitian ini. Serta bapak Dr. Dra. Muhammad Adnan, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka:

Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India*. New York: Yale University Press.

Tadjoeddin, M. Z. (2004). Civil Society Engagement and Communal Violence: Reflection of Various Hypotheses in the Context of Indonesia. *Politics Administration and Change*, *42*, 1–18.

Huat, C. B. (2014). Multiculturalism in Island South-East Asian. Antropologi Indonesia. https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3449

Sjamsuddin Nazaruddin. (1989). Integrasi Politik Di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Mudzar, A. (2006). Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. 4.

Januar, D. (2014). Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi (Jonminofri Nazir, ed.). Inspirasi.Co.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1967. Instruksi Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Antara Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2016.

Keputusan Sekertaris Jendral Kementrian Agama No 22 Tahun 2016

Daftar Informan:

M. Subchan Yawawi SH - Lurah Kranggan

KH Sinwani - Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Semarang

WS Liem Ping An - Ketua Klenteng Hok Tik Bio & pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah

Eti Herawati, Bambang Prakoso, Teguh Sugiono, Syamsul Nur Rizal -Masyarakat Kalurahan Kranggan